

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

ABSTRAK

Konflik bersenjata non-internasional yang terjadi pasca pemilihan umum pada tahun 2010 di Pantai Gading merupakan permasalahan yang serius. Laurent Gbagbo sebagai mantan Presiden dan salah satu orang paling berkuasa di Pantai Gading, diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui pasukan pertahanan dan keamanan, milisi, tentara bayaran, dan organisasi pemuda yang menimbulkan beban serius ditujukan kepada penduduk sipil. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ utama PBB memiliki tugas, fungsi serta kewenangan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bergerak berdasarkan Piagam PBB dapat menentukan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan melalui konflik yang terjadi, serta penentuan ketidakmauan dan ketidakmampuan negara Pantai Gading oleh Dewan Keamanan dalam mengadili orang yang paling bertanggungjawab atas konflik yang terjadi, melihat hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fakta-fakta di Pantai Gading dalam pemenuhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Laurent Gbagbo beserta pasukan pendukungnya. Dewan Keamanan menemukan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan melalui perencanaan terhadap serangan meluas atau sistematis ditujukan kepada penduduk sipil yang dilakukan oleh Laurent Gbagbo beserta pasukan pendukungnya. Dilanjutkan dengan perbandingan pengadilan Slobodan Milosevic di *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan Ferdinand Nahimana di *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) menghasilkan kesamaan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Laurent Gbagbo di Pantai Gading. Dewan Keamanan dapat meneruskan kasus tersebut kepada Penuntut Umum sebagai pelimpahan wewenang di lembaga pengadilan pidana internasional. Penentuan ketidakmauan atau ketidakmampuan oleh Dewan Keamanan menyatakan Pantai Gading tidak memiliki niat untuk membawa orang yang bersangkutan kepada keadilan dan berketidakmampuan dalam mengadili Laurent Gbagbo menggunakan hukum nasionalnya, diakibatkan karena konflik berkepanjangan, ketegangan politik, serta ketidakberfungsian secara total sistem yudisial di Pantai Gading, sehingga lembaga pengadilan pidana internasional sebagai pelengkap dapat menjalankan yurisdiksinya atas konflik tersebut.

***Kata Kunci: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Dewan Keamanan PBB,
Laurent Gbagbo di Pantai Gading***

ABSTRACT

Non-international armed conflict that occurred after the general election in 2010 in Ivory Coast is a serious problem. Laurent Gbagbo as a former President and one of the most powerful person in Ivory Coast, suspected of committing crimes against humanity through defense and security forces, militias, mercenaries and youth organizations that poses a serious burden to civilians. Therefore, the UN Security Council as one of the main organs of the UN has the duties, functions and authorities to maintain international peace and security, moving under the UN Charter can determine the elements of crime against humanity through the conflict, as well as determining the unwillingness and inability of the Ivory Coast state by the Security Council to judge the people who is most responsible for the conflict, based on this conflict the author is interested to do some research.

To answer these questions, normative legal research methods approach to be used. The research data were sourced from secondary data obtained through literature study and descriptive analytical research specifications.

The result showed that there are come facts in Ivory Coast in fulfilling crimes against humanity committed by Laurent Gbagbo and his pro-forces. The Security Council found elements of crimes against humanity through planning for widespread or systematic attacks aimed at civilians carried out by Laurent Gbagbo and his pro-forces. Followed by a comparison of the Slobodan Milosevic court in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and Ferdinand Nahimana in the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) produced a common element of crimes against humanity committed by Laurent Gbagbo in Ivory Coast. The Security Council can forward these case to the Public Prosecutor as a delegation of authority in the international criminal court institution. Determination of unwillingness or inability by the Security Council states that Ivory Coast has no intention of bringing the person concerned to justice and has an inability to judge Laurent Gbagbo using national law, due to prolonged conflict, political tensions, and total malfunction in the judicial system in Ivory Coast, so that the institution an international criminal tribunal as a complement can exercise its jurisdiction over the conflict.

Keywords: Crimes Against Humanity, UN Security Council, Laurent Gbagbo in Ivory Coast